

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari pemahaman mengenai gender. Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakhri membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Contohnya, perempuan yang dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan lain-lain. Ciri-ciri tersebut dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sementara ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dari suatu tempat ke tempat lain.¹

Kabupaten Kuningan, dimana masih banyak sekali masyarakat yang menganut pola perilaku yang didasarkan pada adat istiadat yang lama. Tradisi adat istiadat dan pemaknaan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang lebih mengarah pada patriarki (penekanan pada peran laki-laki), sehingga mengakibatkan kaum perempuan kurang dilibatkan dalam pembangunan. Kaum perempuan dianggap

¹ Muhajir. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota)" *Al-Qadhâ'*: Vol. 5, No. 2, juli 2018. Hal. 10.

hanya layak berada pada ranah domestik bukan ranah sosial, permasalahan kemasyarakatan isu-isu sosial hanya dilibatkan pada kaum laki-laki.²

Pengaruh budaya patriarki seakan menekankan sikap tegas bahwasannya perempuan dan public adalah 2 dunia yang jelas beda dan tidak bisa bersamaan antara keduanya. Perempuan dunianya ialah dirumah dimana hanya mencakup pekerjaan domestic, mengurus buah hati dan semua aneka ragamnya dan jikalau berkarir diluar rumah maka karier bukan menjadi focus yang pertama. Perempuan harus mempersiapkan diri sebagai peran ganda, yakni sebagai seorang ibu dan wanita karir.³

Dewasa ini, keterlibatan perempuan dalam ruang lingkup publik telah mendapatkan porsi yang seimbang dengan laki-laki, meskipun dalam beberapa kondisi masih didominasi oleh laki-laki. Banyak perempuan yang mengisi posisi strategis di ranah publik, baik di instansi, pemerintahan, legislatif, ataupun profesi yang lainnya. Salah satunya yakni para pegawai perempuan instansi pemerintahan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan yang bisa dikatakan sedikit dan hanya mencapai 20% saja. Ini adalah bukti bahwa masyarakat di beberapa wilayah telah sadar akan hak-hak perempuan. Berikut di bawah ini daftar susunan pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan.

² Awan Mutakin (2005) "Nilai-nilai Kearifan Adat dan Tradisi Di Balik Simbol Kuda Kuningan", Kuningan.

³ Devi Sri Wulandari (2020) *Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa : Studi kasus di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati. Bandung; tidak diterbitkan

Tabel 1.1 Data Pegawai BNNK Kuningan

NO	NAMA	JABATAN	STATUS			KET	RIWAYAT PENDIDIKAN
			PNS	POLRI	PPNPN		
1	YAYA SATYANAGARA	Kepala		√		PNG Polri	S.1
2	AISYAH, S. IP	Kasubbag Umum	√			Organik BNN	S.1
3	SUTARDI, S.IP	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	√			Organik BNN	S.1
4	IIM IBRAHIM, A.Md	Verifikator Keuangan	√			Organik BNN	D.3
5	LUSI HERAWATI, A.Md	Pengolah Data	√			Organik BNN	D.3
6	GALIH LANTIKA	Pengadministrasi Umum	√			Organik BNN	SLTA
7	DEDY NURYADI, SE	Penyuluh Narkoba Ahli Muda	√			Organik BNN	S.1
8	SONI SUTRISNO, S. Kom	Analisis Data dan Informasi	√			Organik BNN	S.1
9	NOVY KHUSNUL KHOTIMAH, S.I.kom	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	√			Organik BNN	S.1
10	YOGI SUSANDI, A. Md	Pengelola Barang Milik Negara	√			Organik BNN	D.3
11	INE DWI JUNIAR KURNIAWATI, S. Km	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	√			Organik BNN	S.1
12	ASEP SYARIPUDIN, S.STP., M.Si	Konselor Adiksi Ahli Muda	√			Organik BNN	S.1 S.2
13	RUDI SUSANTO, SE	Konselor	√			Organik BNN	S.1
14	AHMAD NURONI	Pengadministrasi Umum	√			Organik BNN	SPK
15	ADE MOCHAMAD FRIADI, SE	Penyidik	√			Organik BNN	S.1
16	HASYIM RIYADI, S.Sos	Penyidik BNN Ahli Pertama	√			Organik BNN	S.1
17	ALI INDRIAWAN, SH	Penyidik		√		PNG Polri	S.1
18	Toni Triana	Tenaga Keamanan			√	PPNPN	SLTA

NO	NAMA	JABATAN	STATUS			KET	RIWAYAT PENDIDIKAN
			PNS	POLRI	PPNPN		
19	Nana Suryana	Tenaga Keamanan			√	PPNPN	SLTA
20	Ugi Sugiarto	Tenaga Keamanan			√	PPNPN	SLTA
21	Aan Sudiana	Tenaga Keamanan			√	PPNPN	SLTA
22	Muhammad Rusli	Tenaga Keamanan			√	PPNPN	SLTA
23	Agus Rumli	Tenaga Keamanan			√	PPNPN	SLTA
24	Nindita Frida, S.Pd	Pramubakti			√	PPNPN	S.1
25	Emod Somad, S. Kom	Pramubakti			√	PPNPN	S.1
26	Ecih Nengsih	Pramubakti			√	PPNPN	SLTA
27	Andriana	Pengemudi			√	PPNPN	SLTA
28	Yogha Adhie Nugraha, S. Hut	Pengemudi			√	PPNPN	S.1
29	Arip Budiarsa, SE	Penyuluh			√	PPNPN	S.1
30	Mochammad Giffary Nugrapratama,	IT Kehumasan			√	PPNPN	S.1
31	Anggi Wijayanti, S. Sos	IT Kehumasan			√	PPNPN	S.1
32	Rizha Nursyachfijar, S. M	IT Kehumasan			√	PPNPN	S.1
33	Yusi Febriani, S.Kom	IT Kehumasan			√	PPNPN	S.1
34	Ade Cindra Rizki Fauzi, dr, MARS	Dokter Umum Klinik Pratama			√	PPNPN	S.2
35	Asep Ridwan, A.M.K	Perawat Klinik Pratama			√	PPNPN	D.3

Sumber: Arsip BNNK Kuningan

Konsep kesetaraan gender yang disuarakan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan mendorong munculnya berbagai isu tentang makna kesetaraan gender bagi kemajuan pembangunan. Keberadaan perempuan telah

membawa banyak perubahan di negeri ini, terutama perubahan positif yang banyak telah dirasakan efeknya selama ini. Di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Kuningan perempuan mesti berbenah dan memperbaiki sekaligus menunjukkan perannya. Di tingkat Kabupaten peran perempuan mulai dan bahkan sudah bangkit, terutamanya di instansi pemerintahan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan.⁴

Masyarakat dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah dalam hal keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang hanya menyediakan sedikit kuota, pemerintah yang hanya memberikan sedikit persentase bagi keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Dari 100%, perempuan hanya diberikan porsi 30 saja. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total Caleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bagi partai politik yang tidak menjalankannya mendapatkan sanksi tidak ikut dalam pemilu. Hal ini merupakan buah gagasan dari penyetaraan gender dalam bidang politik. Dalam praktiknya tidaklah dengan mudah dapat diterapkan, seperti dalam kasus Pemilihan Legislatif 2019 ini, yakni satu diantara partai yang turut serta dalam pesta demokrasi tersebut yakni Partai Golkar hanya mampu menyumbangkan 22% keterwakilan perempuan yang lolos ke Senayan pada DPR RI untuk periode 2019-2024.⁵ Keterlibatan peran perempuan pada instansi BNNK Kuningan juga masih sangat sedikit, mengingat ada beberapa faktor yang

⁴ Muhamad Abi Aulia. *Peran Perempuan Dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)*. Skripsi Fakultas Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; tidak diterbitkan

⁵ Hasriani Hamid (2019) "Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action" Vol. 3, No. 1 Desember. Hal 25-26.

menyebabkan keikutsertaan perempuan pada instansi BNNK Kuningan masih sedikit. Hal tersebut masih perlu lagi untuk dikaji secara mendalam mengapa perempuan di kabupaten Kuningan masih belum bisa berperan sepenuhnya dalam instansi pemerintahan BNNK Kuningan.

Fenomena di atas menimbulkan suatu permasalahan dan membuat penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai sebuah penelitian yang lebih mendalam. Secara rasional, jika perempuan terus dibatasi langkah dan keinginannya, perempuan Indonesia tidak akan dapat maju dan tidak bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Berdasarkan kenyataan dengan peristiwa diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Keterlibatan Peran Perempuan Dalam Pemerintahan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Peran aktif perempuan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan masih sangat kurang, hanya 20% saja perempuan yang terlibat sebagai pegawai pada pemerintahan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan.
2. Beberapa faktor penyebab kurangnya peran perempuan di Badan Narkotika Nasional diantaranya yaitu salah satunya budaya patriarki yang masih dominan di lingkungan Kabupaten Kuningan.

3. Perempuan memiliki peran yang sangat penting di instansi pemerintahan. Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Keterlibatan Peran Perempuan dalam Pemerintahan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, diantaranya:

1. Bagaimana peran perempuan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan?
2. Apa faktor penyebab kurangnya peran perempuan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan agar perempuan memiliki peranan besar dalam instansi pemerintahan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peran perempuan dalam instansi pemerintahan khususnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan.
2. Mengetahui faktor penyebab kurangnya peran perempuan dalam instansi pemerintahan khususnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan.

3. Mengetahui upaya yang dilakukan agar perempuan memiliki peranan besar dalam instansi pemerintahan khususnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan basis pengetahuan supadi bidang ilmu sosial.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan studi lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan dalam pemerintahan.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat dan lingkungan, penelitian ini dapat menjadi acuan agar melek pendidikan untuk kaum perempuan. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat membantu supaya partisipasi perempuan dalam publik meningkat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai

peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.⁶

Perempuan mempunyai kedudukan yang amat besar dalam masyarakat dan memainkan peran yang penting di dalamnya. Selama ini banyak masyarakat beranggapan bahwasannya dunia pemerintahan identik dengan dunia laki-laki. Anggapan tersebut terlihat karena adanya image yang terbangun di pikiran masyarakat mengenai pemerintahan yang keras, penuh kritik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah perempuan yang terjun di dunia pemerintah masih minim, termasuk di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Peran Perempuan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan masih sangat kurang, hanya sekitar 20% saja. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yakni tingkat pendidikan yang rendah di wilayah Kabupaten Kuningan, budaya patriarki yang masih melekat karena di wilayah Kabupaten Kuningan mayoritas masyarakat desa yang pemikirannya belum modern, formasi jabatan di BNNK Kuningan yang sedikit kuotanya untuk perempuan menjadi faktor penyebab

⁶ Soejono Soekanto (2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada

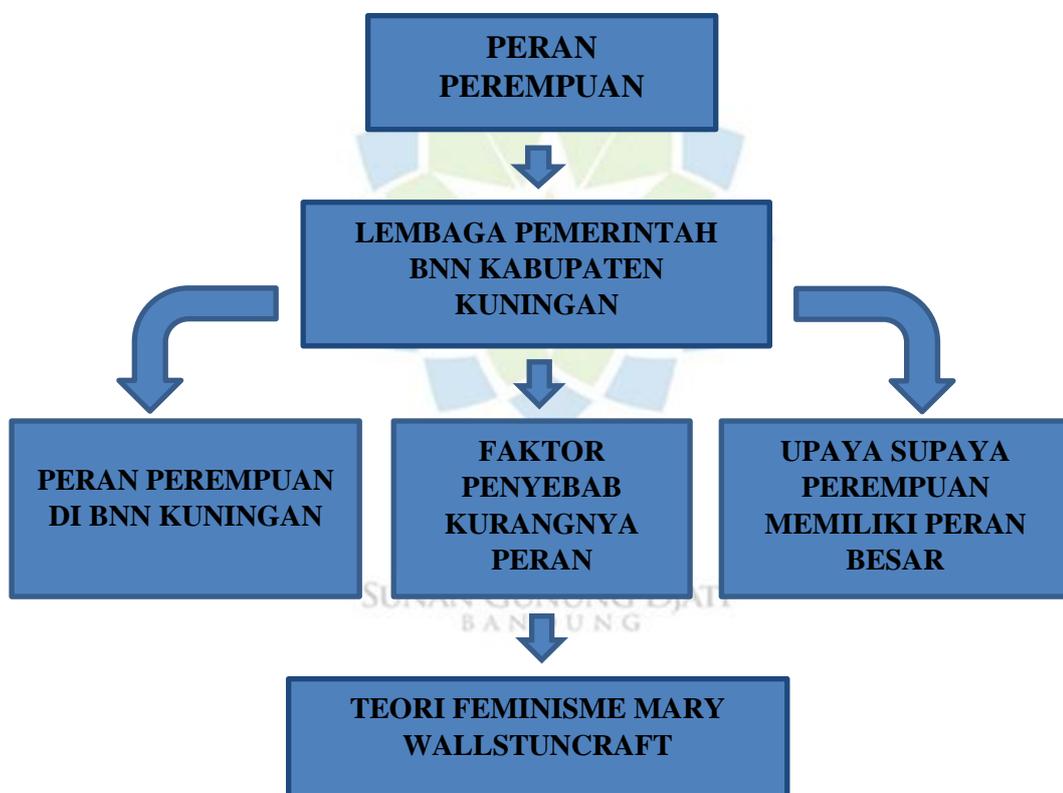
kurangnya peran perempuan, serta faktor pemahaman perempuan terhadap peran dimana pegawai perempuan BNNK Kuningan belum sadar betul akan perannya, mereka hanya menjalankan tugas sebagaimana mestinya tanpa mengupayakan perempuan agar bisa lebih memiliki peran yang besar di instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan ini.

Salah satu upaya agar perempuan memiliki peran besar di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan adalah dengan meningkatkan pengetahuan pegawai BNNK Kuningan itu sendiri, mengikuti pelatihan agar memiliki pengalaman yang lebih matang dan wawasan lebih jauh, serta berpendidikan tinggi untuk menunjang karir pegawai perempuan BNNK Kuningan. Sementara upaya yang dapat dilakukan oleh pejabat struktural yaitu dengan memberikan reward juga memfasilitasi sarana dan prasarana yang belum ada.

Salah satu teori dasar tentang peran perempuan adalah teori feminisme. Teori feminis dari Mary Wollstonecraft ini berpendapat bahwa pada hakekatnya sama sekali tidak terdapat pembeda antara perempuan dan laki-laki. Sebabnya, sebagai perempuan, kita wajib mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Namun, kelompok feminis liberal tidak menerima kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan. Karena fungsi organ reproduksi pada wanita tetap membawa konsekuensi rasional dalam kehidupan mereka ketika mereka berpartisipasi dalam masyarakat di lingkungan mereka. Teori feminis liberal ini adalah yang paling moderat di antara teori-teori feminis lainnya. Pendukung teori ini ingin perempuan sepenuhnya dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam berbagai peran, termasuk berprofesi di luar. Karena cara inilah, tidak akan ada lagi kelompok seks yang

dominan karena organ reproduksi tidak menjadi penghambat untuk perempuan ketika mereka mengakses fungsi di sektor publik.⁷

Untuk memperjelas arah penelitian dan untuk memenuhi tujuan penelitian, maka kerangka berpikir harus dibuat sejelas mungkin. Adapun pada penelitian ini kerangka berfikirnya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Konseptual

⁷ Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi” *Jurnal Filsafat Indonesia*. Vol 4 No 3 Tahun 2021 ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990